

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Template Naskah Publikasi Karya Ilmiah

Skripsi dan Tesis

Tahun Akademik 2019/2020

Ketentuan Umum:

1. Naskah Publikasi dibuat dalam dua Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
2. Naskah Publikasi wajib diunggah ke <http://repository.stei.ac.id>
3. Naskah Publikasi wajib dibuat sesuai dengan template yang berlaku dan diunggah ke repository STEI dalam format PDF file.
4. Format nama file skripsi/tesis/laporan tugas akhir:
NPM_NAMA_BIDANG KAJIAN_TAHUN
5. Format Nama file naskah publikasi
 - a. **NPM_Artikel Indonesia_Tahun**
 - b. **NPM_Artikel Inggris_Tahun**
6. Isi naskah publikasi diketik dengan Times New Roman fonts 11, 1 spasi, sekitar 15-25 halaman (A4 paper) termasuk daftar referensi.
7. Gunakan nomor halaman di pojok kanan bawah
8. Komposisi penulis pada naskah publikasi:
 - a. Penulis pertama: Mahasiswa STEI
 - b. Penulis kedua dst: Dosen Pembimbing
 - c. Email dosen yang dicantumkan di naskah publikasi, menggunakan email stei.ac.id

Template naskah publikasi ini diadaptasi dan disesuaikan dari <https://ejournal.stei.ac.id/>

TINGKAT INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Rahmah Intan Syahputri, Merliyana

Departemen Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

rahmahintansyahputri@gmail.com; merliyana@stei.ac.id

Abstract - Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Direktorat Jendral Pajak pada periode Tahun 2015-2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metoda berbasis regresi linier berganda dengan Eviews 10.0. Populasi dalam penelitian ini adalah Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada periode tahun 2015-2019. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh, dengan jumlah sampel sebanyak jumlah Populasinya sebesar 60 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metoda dokumentasi melalui situs resmi Bank Indonesia: www.Bi.go.id, Badan Pusat Statistika: www.bps.go.id, dan situs DJP: www.pajak.go.id. pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada periode tahun 2015-2019, (2) Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada periode 2015-2019, dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada periode tahun 2015-2019.

Keywords: Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga, Penerimaan Pajak Penghasilan

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang sedang gencar melaksanakan pembangunan. Tercapainya pembangunan yang optimal tentu sangat dipengaruhi penerimaan pajak yang optimal pula. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara adalah dapat dilaksanakannya Program Pembangunan Nasional yang untuk pelaksanaan tahunannya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor pajak yang rata-rata pertahunnya rentan 5 tahun terakhir sebesar 86% (www.pajak.go.id). Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2011:2). Dari presentase penerimaan pajak posisi terbesar diambil oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 634.124 triliun atau mencapai 82,95% per tahun. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 464,66 triliun atau mencapai 90,46 persen dari target sebesar Rp 513,65 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan PPh mengalami pertumbuhan sebesar 7,79 persen (www.bps.go.id). Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, Jika penerimaan pajak terganggu hal tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas pemerintah. Agar penerimaan pajak tidak terganggu maka harus dilakukan antisipasi terhadap halhal yang mempengaruhi penerimaan pajak. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati juga berlaku didalam pengelolaan keuangan negara.

Secara garis besar, hal yang mempengaruhi penerimaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mikro atau yang berhubungan langsung terhadap penerimaan pajak telah banyak dibahas. Misalnya tentang kepatuhan pajak, perlawanan pajak. Dari sisi makro tidak sebanyak dari sisi mikro, pertimbangannya adalah sisi makro tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi patut diketahui bahwa sisi makro akan memberikan dampak yang sangat besar. Sisi makro tersebut diantaranya adalah inflasi, Nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga (Sitinjak, 2016).

Negara Indonesia tidak pernah lepas dari masalah inflasi. Badan Pusat Statistika mencatat inflasi sepanjang 2015 mencapai 6,38%. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi selama periode 2015-2019. Secara berturut-turut inflasi tahunan pada periode 2015-2019 sebesar 6,38%; 3,56%; 3,81%; 3,20% dan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,03%. Rendahnya inflasi di 2019 disebabkan harga-harga barang bergejolak yang relatif terkendali, pemerintah dapat menekan laju inflasi di Indonesia (www.bps.go.id).

Variabel ekonomi makro yang lain yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan Negara lain (Handiani, 2014:88). Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketidakpastian ekonomi global serta tingginya permintaan dolar AS di pasar domestik membuat rupiah kini berada di atas Rp 14 ribu. Menurut data Jakarta Interbank Spot Rate Dollar (JISDOR) nilai tukar rupiah berada di level Rp 14.172 per dolar AS pada 17 Oktober 2019. Nilai tersebut melemah 17,7 persen dibanding posisi 20 Oktober 2014, hari pengangkatan Jokowi menjadi presiden ke-7. Menurut data Bank Indonesia (BI) nilai tukar rupiah sempat melemah hingga mendekati Rp 15 ribu per dolar AS pada 2015. Bahkan, rupiah sempat melemah hingga Rp 15.253 per dolar AS Tahun 2018 dan merupakan level terburuknya dalam lima tahun.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2018, mengakibatkan Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan dengan menaikkan suku bunga acuan. Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 – Day Reverse Repo Rate sebanyak enam kali. Dari Mei hingga Desember, suku bunga acuan naik 175 bps dari 4,50% menjadi 6,00%. Di awal tahun, suku bunga acuan Bank Indonesia dipatok 4,25%. Besaran suku bunga tersebut ditahan oleh BI hingga bulan April. Kemudian pada Mei, BI mulai menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,50% (economy.okezone.com).

Dengan memahami bahwa situasi ekonomi global dan nasional akan terus bergerak dinamis yang akan membuat angka asumsi makro tersebut dapat berubah setiap saat. Meskipun demikian melalui berbagai langkah dan kebijakan yang terus makin terpadu, Pemerintah akan berupaya agar asumsi makro dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga dapat terjaga dan terealisasi sesuai perhitungan awal, yang artinya perlu diupayakan agar dampaknya terhadap anggaran dan perekonomian tidak terlalu signifikan.

Studi-studi untuk mendapatkan bukti empiris yang mengaitkan pola hubungan antara tingkat inflasi dengan penerimaan pajak menemukan hasil yang berbeda. Penelitian pertama oleh Renata *et al* (2016) mengatakan bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti dan Kristanti (2017) mengatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, studi yang mengaitkan nilai tukar dengan penerimaan pajak menemukan adanya perbedaan hasil penelitian atau GAP dari penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Sumidartini (2017) menemukan hasil bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Renata *et al* (2016) mengatakan bahwan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Studi yang mengaitkan tingkat suku bunga dengan penerimaan pajak memiliki hasil berbeda dari penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syairozi dan Fatah (2017) menunjukkan hasil bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) dan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al* (2018) menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa tingkat suku bunga berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan ulasan fenomena dan Riset-riset diatas guna mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak memberikan hasil yang berbeda. penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jendral Pajak.

REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Damayanti *et al* (2019) mengenai pengaruh tingkat inflasi, economic growth, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak di negara – negara Asia, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Metode *explanatory research*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat inflasi, *economic growth*, dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,361 yang berarti 36,1% penerimaan pajak negara-negara Asia dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumidartini (2017), mengenai pengaruh nilai tukar rupiah serta tingkat suku bunga terhadap penerimaan pajak pada direktorat jendral pajak, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan pajak dengan pengaruh sebesar 47,90% dengan sifat searah (positif), Terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga dengan penerimaan pajak sebesar 52,20 % dengan sifat tidak searah (negatif), dan Terdapat hubungan yang signifikan antara, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Renata *et al* (2016), mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPn). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN, nilai tukar berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan PPN, dan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al* (2018), yang berjudul dampak kebijakan dan makroekonomi terhadap efektivitas penerimaan pajak di bursa efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan Penelitian menggunakan data sekunder dari dua sektor yaitu sektor Industri Barang Konsumsi (IBK) dan sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (IUT) periode tahun 2010-2015 yang bersumber dari BEI. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan positif antara nilai tukar (makro-ekonomi) dan kebijakan pajak, kemudian peningkatan inflasi berdampak signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan ETR di kedua sektor, dan Penurunan suku bunga BI berdampak positif pada penerimaan pajak dan ETR di kedua sektor.

Penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti dan Kristanti (2017), mengenai analisis pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak pada kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Penelitian ini dilakukan untuk masa 3 tahun yaitu 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 dengan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling *non- probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial, PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo sedangkan inflasi dan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Secara simultan, PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi "*pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" (Mardiasmo, 2016:3). Dengan kata lain, Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2011:2).

Penerimaan Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135) Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Sedangkan Menurut Resmi (2011:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2018:152).

Inflasi

M. Natsir (2014:253) menyatakan bahwa pengertian inflasi “Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus”. Sementara itu Bank Indonesia memberikan pengertian Inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (www.bi.go.id).

Nilai Tukar Rupiah

Perdagangan internasional akan mendorong terjadinya pertukaran dua atau lebih mata uang berbeda. Transaksi ini akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang nilai tukar. Menurut Nopirin (2012:163) Harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut exchange rate.

Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang tingkat suku bunga. Menurut Sunaryah (2011:80) “*Harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu*”. Menurut Boediono (2014:76) “*Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung*”.

Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut M. Natsir (2014:253) Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan adanya inflasi masyarakat akan mengurangi tingkat belanja mereka dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik dan nilai mata uang yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga menurunkan nilai mata uang. Banyak perusahaan atau badan usaha yang terganggu dalam memasarkan produk mereka dikarenakan tingkat belanja masyarakat mengalami penurunan yang berdampak terhadap menurunnya penghasilan yang diterima yang berakibat semakin kecil pula pajak yang dibayar kepada negara.

H₁ :Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Perdagangan internasional akan mendorong terjadinya pertukaran dua atau lebih mata uang berbeda. Transaksi ini akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang nilai tukar. Menurut Nopirin (2012:163) Harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut exchange rate.

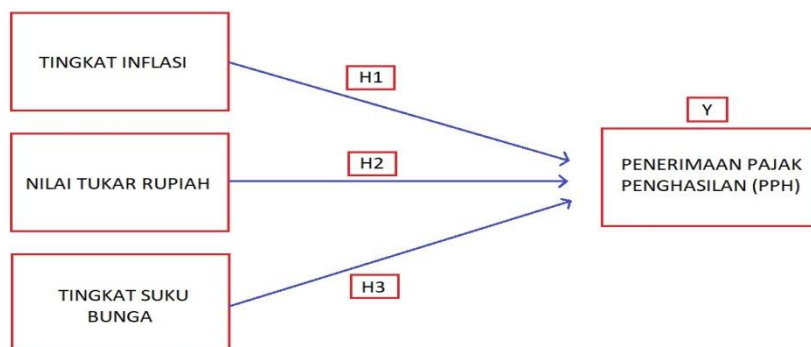
Dalam kondisi kurs yang stabil akan mendorong dunia usaha menjalankan kegiatannya dengan tenang khususnya bagi usaha yang menggunakan valuta asing dalam transaksinya. Fluktuasi kurs yang ekstrim dapat mengakibatkan perusahaan merugi atau bahkan kolaps dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam menghitung penghasilan neto untuk kepentingan perpajakan, kerugian akibat selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga semakin besar kerugian akibat selisih kurs maka semakin kecil keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga Pajak Penghasilan yang dibayar juga semakin kecil (Sumidartini, 2017).

H₂ :Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Sumirdatini (2017) suku bunga domestik sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan baiknya akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang tidak fleksibel. Peningkatan akses tersebut telah memperbesar kendala manajemen moneter Bank Indonesia. Setiap upaya untuk mempengaruhi *money supply* dengan meningkatkan suku bunga di atas suku bunga internasional akan mendapat gangguan dari arus modal masuk berjangka pendek. Namun, Bank Indonesia terlihat dapat mempertahankan derajat kebebasan beberapa suku bunga domestik sehingga tetap dapat mempengaruhi suku bunga domestik tanpa merubah kebijakan nilai tukar. ketika tingkat suku bunga tinggi maka biaya perusahaan akan naik (karena bunga adalah biaya) sehingga harga pokok naik, laba berkurang, dan pajak terutang berkurang (Sumidartini, 2017).

H₃ :Tingkat Suku Bunga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).



Gambar 1. Kerangka konseptual

III. METODA PENELITIAN

Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Sugiyono (2017: 36-37) juga menyatakan asosiatif kausal adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi dalam penelitian ini terdapat variabel independen (yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan sebab akibat dari pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini Tingkat Inflasi sebagai variabel X_1 , Nilai Tukar Rupiah sebagai variabel X_2 , dan Tingkat Suku Bunga sebagai variabel X_3 , sedangkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai variabel Y .

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga, dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2019 yang diambil dalam setiap bulan berjumlah 60 pengamatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017: 85) adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam kurun waktu tahun 2015-2019, maka jumlah sampelnya 60 pengamatan.

Data dan Metoda Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diteliti merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017: 137) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari website Bank Indonesia, Badan Pusat Statistika, dan Dirjen Pajak melalui situs www.bi.go.id, bps.go.id dan pajak.go.id, data yang dimaksud meliputi Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Suku Bunga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Data bersifat *time series* karena data dalam penelitian ini adalah data dalam interval waktu tertentu, dalam penelitian ini yaitu tahun 2015-2019.

Variabel Dependen atau Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017: 39). Dalam penelitian ini variabel dependent yang diteliti adalah *Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang bertanggung jawab atas kebijakan perpajakan "*pajak penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (subjek pajak/Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima atas diperoleh (objek pajak) dalam Tahun Pajak*". Pada penelitian ini yang menjadi indikator penerimaan pajak penghasilan (PPh), menurut Kuncoro (2013) adalah Target penerimaan PPh dan Realisasi Penerimaan PPh. Dalam operasionalisasinya variabel ini diukur oleh instrumen pengukuran dalam skala rasio.

Variabel Independen atau Bebas

Variabel bebas (X) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *abtecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

(terikat) (Sugiyono, 2017: 39). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga.

Inflasi

Data inflasi yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*). Besarnya IHK dapat dihitung dengan menggunakan *Laspeyres Index* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laspeyres Index} = \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100\%$$

P_o = tingkat harga yang berlaku pada tahun awal observasi,

Q_o = jumlah barang yang dikonsumsi pada periode awal observasi

P_n = merupakan tingkat harga yang berlaku pada tahun n.

Nilai Tukar Rupiah

Pada penelitian ini mata uang asing yang digunakan adalah US dollar dan mata uang domestik menggunakan Rupiah. Variabel nilai tukar juga digunakan dalam penelitian ini karena penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang digunakan dalam penelitian juga menyertakan pajak atas kegiatan perdagangan internasional sehingga variabel nilai tukar dianggap sangat penting untuk melihat nilai riil dari ekspor maupun impor barang atau jasa. Pengukuran nilai tukar dalam penelitian ini menggunakan kurs tengah. Menurut Mahyus Ekananda (2014:201) nilai kurs tengah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kurs Tengah} = \frac{K_b + K_j}{2}$$

Keterangan:

K_b : Kurs Beli

K_j : Kurs Jual

Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Pengukuran tingkat suku bunga dalam penelitian ini menggunakan harga BI Rate, seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia “*BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik*”.

Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yaitu uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas dan uji hipotesis, diantaranya uji koefisien determinasi (R^2) dan Uji Hipotesis Parsial (Uji T). Alat pengolah data dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews 10.0*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen dan taksiran perubahan variabel dependen untuk setiap satuan perubahan nilai variabel independen. Persamaan regresi linier berganda mengacu kepada Sugiyono (2017:313) adalah sebagai berikut:

$$P.PPh = \alpha + \beta_1 TI + \beta_2 NTR + \beta_3 TSB + \varepsilon$$

Keterangan:

P.PPh = Penerimaan Pajak Penghasilan

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien regresi

TI = Tingkat Inflasi

NTR = Nilai Tukar Rupiah

TSB = Tingkat Suku Bunga

ε = Tingkat kesalahan

Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak. H0 diterima berarti ada hubungan yang signifikan (berpengaruh) antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – 1, untuk menentukan tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

IV. HASIL

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh data inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan pajak penghasilan periode tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah data inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga dalam kurun waktu tahun 2015-2019, penulis memperoleh data dari www.bps.go.id, bi.go.id, dan pajak.go.id.

Analisis Deskriptif Seluruh Sampel

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Suku Bunga dan Penerimaan Pajak Penghasilan disajikan pada tabel berikut :

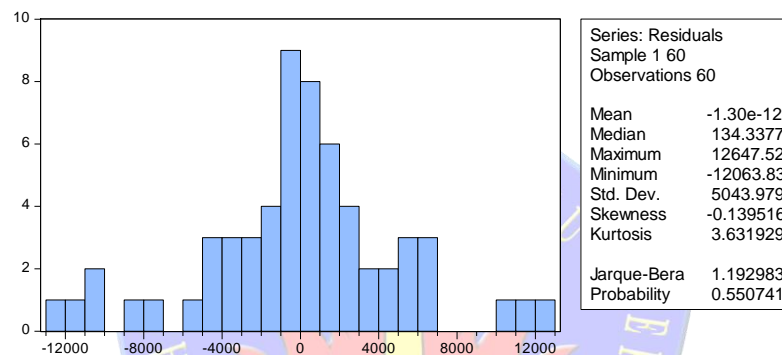
	PPh	TI	NTR	TSB
Mean	696.771.186.000.000	3,989833	13692,68	5,677167
Maximum	818.564.900.000.000	7,26	15178,87	7,75
Minimum	602.308.130.000.000	2,48	12579,1	4,25
Std. Dev.	86.630.602.072.657	1,372115	542,0219	1,146096
Observations	60	60	60	60

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.0

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal.



Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.0

Melihat grafik histogram dan uji statistik *jarque bera* (JB-Test) berdasarkan grafik 4.1 uji normalitas dapat dilihat nilai probabilitasnya sebesar 0.550741 dimana nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05 yaitu $0.550741 \geq 0.05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	9.109562	Prob. F(3,56)	0.0001
Obs*R-squared	19.67775	Prob. Chi-Square(3)	0.1302
Scaled explained SS	24.25162	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 06/09/20 Time: 13:39

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21832.29	11726.58	-1.861778	0.0679
TINGKAT_INFLASI	206.0804	483.4714	0.426252	0.6716
NILAI_TUKAR_RUPIAH	1.168709	0.857325	1.363205	0.1783
TINGKAT_SUKU_BUNGA	1517.430	526.8606	2.880137	0.0656

Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada Direktorat Jendral Pajak

R-squared	0.327963	Mean dependent var	3607.408
Adjusted R-squared	0.291961	S.D. dependent var	3493.962
S.E. of regression	2939.997	Akaike info criterion	18.87455
Sum squared resid	4.84E+08	Schwarz criterion	19.01417
Log likelihood	-562.2364	Hannan-Quinn criter.	18.92916
F-statistic	9.109562	Durbin-Watson stat	0.685023
Prob(F-statistic)	0.000053		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.0

Berdasarkan pada table diatas dapat dilihat dari nilai probabilitas *chi square* memiliki nilai sebesar 0.1302 yaitu *p-value* \geq dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

	TINGKAT_INFLASI	NILAI_TUKAR_RUPIAH	TINGKAT_SUKU_BUNGA
TINGKAT_INFLASI	1	-0.4147210991206855	0.7138830813038368
NILAI_TUKAR_RUPIAH	-0.4147210991206855	1	-0.02525173606992942
TINGKAT_SUKU_BUNGA	0.7138830813038368	-0.02525173606992942	1

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.0

Berdasarkan pada table diatas dapat diketahui bahwa variabel independen yang terdiri dari Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga bebas dari uji multikolinieritas disebabkan memiliki nilai korelasi dibawah 0.80.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	29.62548	Prob. F(2,54)	0.0000
Obs*R-squared	31.39097	Prob. Chi-Square(2)	0.3107

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/17/20 Time: 17:30

Sample: 1 60

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TINGKAT_INFLASI	299.3647	605.1644	0.494683	0.6228
NILAI_TUKAR_RUPIAH	0.050969	1.063332	0.047933	0.9619
TINGKAT_SUKU_BUNGA	-222.6913	655.6007	-0.339675	0.7354
C	-576.3895	14542.66	-0.039634	0.9685
RESID(-1)	0.841317	0.133944	6.281112	0.2408
RESID(-2)	-0.167241	0.136648	-1.223882	0.2263

R-squared	0.523183	Mean dependent var	-1.30E-12
Adjusted R-squared	0.479033	S.D. dependent var	5043.979
S.E. of regression	3640.645	Akaike info criterion	19.33235

Sum squared resid	7.16E+08	Schwarz criterion	19.54178
Log likelihood	-573.9705	Hannan-Quinn criter.	19.41427
F-statistic	11.85019	Durbin-Watson stat	1.806201
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.0

Hasil pengujian menggunakan *Breusch Godfrey* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi square sebesar 0.3107, yang artinya lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis dan Regresi Linear Berganda

Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R²* adalah sebesar 0.692321 atau 69.23% yang artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 69.23% sedangkan sisanya 30.77% (100% – 69.23%) dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini. Berikut tabel hasil pengujian hipotesis:

Dependent Variable: PAJAK_PENGHASILAN
 Method: Least Squares
 Date: 06/09/20 Time: 13:40
 Sample: 1 60
 Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TINGKAT_INFLASI	-3109.414	851.3911	-3.652158	0.0006
NILAI_TUKAR_RUPIAH	9.929477	1.509745	6.576921	0.0000
TINGKAT_SUKU_BUNGA	713.9152	927.7993	0.769472	0.4448
C	-69543.85	20650.46	-3.367665	0.0014

R-squared	0.707966	Mean dependent var	58064.27
Adjusted R-squared	0.692321	S.D. dependent var	9333.759
S.E. of regression	5177.323	Akaike info criterion	20.00630
Sum squared resid	1.50E+09	Schwarz criterion	20.14593
Log likelihood	-596.1891	Hannan-Quinn criter.	20.06092
F-statistic	45.25283	Durbin-Watson stat	0.474536
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 10.0

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$P.PPh = -69543.85 - 3109.414 TI + 9.929477 NTR + 713.9152$$

Hasil uji t dengan Jumlah pengamatan sebanyak (n = 60), jumlah variabel independen sebanyak (k = 3), maka *degree of freedom* (df) = n-k-1 yaitu 60-3-1= 56 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,05 maka t_{tabel} adalah 2.003241. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tingkat Inflasi* berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPh)* yang menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-3.652158 > 2.003241) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat

signifikansi ($0.0006 < 0.05$). maka dapat disimpulkan H_1 yang menyatakan bahwa *Tingkat Inflasi* berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)*, **diterima**.

2. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)* yang menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6.576921 > 2.003241$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0000 < 0.05$). maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan*, **diterima**.
3. *Tingkat Suku Bunga* berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)* yang menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.769472 < 2.003241$) dan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.4448 > 0.05$). maka dapat disimpulkan H_3 yang menyatakan bahwa *Tingkat Suku Bunga* tidak berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)*, **ditolak**.

Pembahasan

Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa *Tingkat Inflasi* berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)* dapat diterima, hal itu dapat terlihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-3.652158 > 2.003241$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0006 < 0.05$). Koefisien *Tingkat Inflasi* bernilai -3109.414 yang berarti ketika terjadi kenaikan *Tingkat Inflasi* sebesar satu satuan maka akan menurunkan *Pajak Penghasilan (PPH)* sebesar angka koefisien tersebut yaitu -3109.414 . *Tingkat Inflasi* berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)*, hal ini terjadi karena Inflasi berkecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan adanya inflasi masyarakat akan mengurangi tingkat belanja mereka dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik dan nilai mata uang yang semakin menurun. Banyak perusahaan atau badan usaha yang terganggu dalam memasarkan produk mereka dikarenakan tingkat belanja masyarakat mengalami penurunan yang berdampak terhadap menurunnya penghasilan yang diterima yang berakibat semakin kecil pula pajak yang dibayar kepada negara.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan* adalah dapat diterima, hal itu terlihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6.576921 > 2.003241$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0000 < 0.05$). Koefisien Nilai Tukar Rupiah bernilai positif sebesar 9.929477 yang berarti ketika Nilai Tukar Rupiah mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengakibatkan *Pajak Penghasilan* mengalami kenaikan sebesar 9.929477 . *Nilai Tukar Rupiah* berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan (PPH)*, Hal ini terjadi karena perdagangan Internasional mendorong terjadinya pertukaran dua atau lebih mata uang berbeda. Dalam kondisi kurs yang stabil akan mendorong dunia usaha menjalankan kegiatannya desungan tenang khususnya bagi usaha yang menggunakan valuta asing dalam transaksinya. Fluktuasi kurs yang ekstrim dapat mengakibatkan perusahaan merugi atau bahkan kolaps dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam menghitung penghasilan neto untuk kepentingan perpajakan, kerugian akibat selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga semakin besar kerugian akibat selisih kurs maka semakin kecil keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga Pajak Penghasilan yang dibayar juga semakin kecil.

Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap *Pajak Penghasilan* adalah dapat ditolak, hal itu terlihat dari nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.769472 < 2.003241$) dan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.4448 > 0.05$). Koefisien Tingkat Suku Bunga bernilai positif sebesar 713.9152 yang berarti ketika Tingkat Suku Bunga mengalami kenaikan satu satuan maka akan mengakibatkan *Pajak Penghasilan* mengalami

kenaikkan sebesar 713.9152. Hal ini berarti perkembangan Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima oleh pemerintah. Hal ini diduga karena suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan.

V. SIMPULAN, SARAN & KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tingkat Inflasi* berpengaruh terhadap *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)*. Koefisien *Tingkat Inflasi* bernilai negatif menunjukkan bahwa ketika *Tingkat Inflasi* mengalami kenaikan maka akan menyebabkan *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)* mengalami Penurunan.
2. *Nilai Tukar Rupiah* berpengaruh terhadap *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)*. Koefisien *Nilai Tukar Rupiah* bernilai positif menunjukkan bahwa ketika *Nilai Tukar Rupiah* mengalami kenaikan maka akan menyebabkan *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)* juga akan mengalami kenaikan.
3. *Tingkat Suku Bunga* tidak berpengaruh terhadap *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)*. Koefisien *Tingkat Suku Bunga* bernilai positif menunjukkan bahwa ketika *Tingkat Suku Bunga* mengalami kenaikan maka akan menyebabkan *Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)* juga akan mengalami kenaikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diambil terkait dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, disarankan lebih memperhatikan aspek-aspek ekonomi makro seperti inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga terutama yang berpengaruh kepada penerimaan Pajak Penghasilan seperti Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah demi tercapainya peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di negaranya.
2. Bagi pengusaha, dalam menjalankan usaha sebaiknya lebih memperhatikan aspek-aspek ekonomi makro yang fluktuatif seperti inflasi karena tingkat inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pengusaha juga diharapkan mampu memberikan sumbangan penerimaan pajak kepada negaranya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah periode dan variabel lain di luar penelitian ini atau mengganti variabel dependen dengan jenis pajak lain misalnya Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat dibandingkan secara spesifik bagaimana pengaruh variabel ekonomi makro pada jenis-jenis pajak tertentu.

Keterbatasan dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Bagi para peneliti yang berminat untuk mengkaji masalah yang sama hendaknya melakukan penelitian pada periode yang lebih terkini yakni sampai dengan periode tahun 2020.
2. Penelitian ini terbatas pada penerimaan pajak penghasilan di Indonesia, untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkomparasi dengan jenis pajak lainnya dan penerimaan pajak yang berada di negara lain.
3. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini sekiranya dapat menambahkan variabel tambahan yang belum ada dalam penelitian ini seperti variabel moderating atau intervening.
4. Bagi peneliti lain dapat menambahkan variabel independen lain yang belum ada dalam penelitian ini seperti *Economic Growth* dan *Produk Domestik Bruto*, dan *Pengusaha Kena Pajak*, variabel dependen lainnya seperti *Pajak Pertambahan Nilai*.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A. (2020). *Terinfeksi Corona, Rupiah Anjlok ke Rp16.575 per Dolar AS*. Diunduh tanggal 23 Maret 2020, <http://www.cnnindonesia.com>.
- Ali, S. (2014). Inflation, Income Inequality and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration Analysis. *International Journal of Economic Practices and Theories*, Vol. 4, No. 1.
- Badan Pusat Statistika. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2007-2020*. Diunduh tanggal 06 April 2020, <http://www.bps.go.id>.
- Bank Indonesia. (2020). *BI 7-Day Reserve Repo Rate Turun 25 bps Menjadi 4,50%: Menjaga Stabilitas, Memitigasi Risiko COVID-19*. Diunduh tanggal 29 Maret 2020, <http://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2020). *Kurs Transaksi Bank Indonesia*. Diunduh tanggal 16 April 2020, <http://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Inflasi: Indeks Harga Konsumen*. Diunduh tanggal 16 April 2020, <http://www.bi.go.id>.
- Bersiap Tameng Ekonomi Untuk Dampak Wabah Corona. (2020). Diunduh tanggal 29 Maret 2020, <http://www.jeo.kompas.com>.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Internasional - Pengantar Ilmu Ekonomi No. 3*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bramasta, D. B. (2020). *Update Virus Corona di Seluruh Dunia: Tembus 152 Negara, 80.840 Sembuh, 7.905 Meninggal*. Diunduh tanggal 29 Maret 2020, <http://www.kompas.com>.
- Damayanti *et al.* (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Negara-Negara Asia (Studi pada World Bank Periode 2005-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 9 No. 1.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dhaliwal *et al.* (2015). Historical Cost, Inflation, and The US Corporate Tax Burden. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(5), 467-489.
- Edeme *et al.* (2016). Alternative Specification and Estimation of Tax Revenue-Gross Domestic Product Relationship. *Asian Journal of Economic Modelling*.
- Ekananda, M. (2014). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Endarwati, O. (2018). *Insentif Pajak Jaga Pertumbuhan Ekonomi Pasca-Suku Bunga Naik*. Diunduh tanggal 16 April 2020, <http://www.economy.okezone.com>.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handiani, S. (2014). Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia dan Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Periode 2008-2013. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(1), 63-74.
- Harahap *et al.* (2018). Dampak Kebijakan dan Makroekonomi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Volume 8, No. 2, 400-419.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. (2013). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Karunia, A. M. (2020). *Lagi, BI Turunkan Suku Bunga Acuan*. Diakses tanggal 29 Maret 2020, <http://www.money.kompas.com>.
- Kasmir. (2011). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Kusnandar, V. B. (2019). *5 Tahun Jokowi: Nilai Rupiah Turun Hampir 18 Persen*. Diakses tanggal 16 April 2020, <http://www.databoks.katadata.co.id>.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Maulida, R. (2018). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Diakses tanggal 15 April 2020, <http://www.online-pajak.com>.

- Mispiyanti dan Kristanti. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, 219-233.
- Murni, A. (2013). *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nopirin. (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2000). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Renata et al. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9 No. 1.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmana, Y. (2010). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, A. R. (2010). Pengaruh Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Jakarta*.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumidartini. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. *Volume 9, Nomor 01*.
- Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Edisi 6)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suryadi. (2011). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Syairozi dan Fatah. (2017). Analisis Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 1(1), 338-350.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) pada Direktorat Jendral Pajak

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wikipedia. (2018). *John Maynard Keynes*. Diakses tanggal 15 April 2020, <http://www.id.wikipedia.org>.

Yüksel *et al.* (2013). Tax Revenue and Main Macroeconomic Indicators in Turkey. *Ejeps-6 (1)*.

